

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEUANGAN DAN KEMANDIRIAN
UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : RAFIKA PUTRI
NPM : 1305170017
PROGRAM STUDY : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Rafika Putri, 1305170017, Analisis Efektivitas dan Kemandirian Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Medan berdasarkan rasio : rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah pada periode anggaran 2011-2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pemerintah Medan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan :1) rasio efektivitas keuangan daerah atas pendapatan daerah untuk tahun 2011, 2014 dan 2015 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2012 dan tahun 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 89,1%, dan tahun 2014 sebesar 88,6% dan tahun 2015 sebesar 82,8% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 74,3% dan 79,8%, tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. 2). Rasio kemandirian keuangan daerah dimana untuk tahun 2011 rasio kemandirian sebesar 3,62%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada di antara 25% dan 50%, untuk tahun 2012 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 38,3% , yang juga termasuk dalam kategori rendah yang termasuk dalam hubungan konsultatif karena diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2013 sampai tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 36,8%, 34,2%, 33,8%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada dalam 25% dan 50%.

Kata Kunci : kinerja keuangan, rasio efektivitas, rasio kemandirian.

KATA PENGANTAR



Asslaamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin Puji dan syukur penulis ucapkan ke Hadirat Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“Analisis Efektivitas Keuangan dan Kemandirian Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat dan penyelesaian pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, terutama kepada :

1. Teristimewa Ayahanda Almh, H. Ahyar dan Ibunda Hj. Suriaty yang kucintai dan kusayangi yang telah mengasuh, mendidik, memberikan bimbingan, nasehat serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitri Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ihsan Abdullah SE , M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga terwujud penulis skripsi ini.
6. Bapak dan ibu staf pengajar dan seluruh pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dan Kepada seluruh sahabat yang sangat penulis cintai yaitu Ahmad irsal, Rofiqoh Nur, Nadia Hafsari, Cahyani Sucitra, Nurul Hidayah, Hazrahini, Hazmikurnia, Ive, Irmawan, Riyan, Fajri, Munawar, Vivin. Terima kasih Atas segala Dukungan Dan Motivasi yang di berikan sehingga skripsi ini dapat Diselesaikan Tepat waktu.

Semoga Allah Swt senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi penulis sendiri. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Medan, Oktober 2017

Penulis

RAFIKA PUTRI

1305170017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teoritis	11
1. Kinerja Keuangan Daerah.....	11
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	11
b. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	12
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	13
d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
e. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
f. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	20
3. Rasio Kemandirian.....	22
B. Kerangka Berfikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	27
D. Sumber dan Jenis Data.....	28
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV ANALIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Analisis Data.....	32
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	32
b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	35
B. Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	4
TABEL 1.2 Sumber-sumber Pendapatan Daerah	5
TABEL 2.1 Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah	20
TABEL 2.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	22
TABEL 2.3 Tingkat Desentralisasi Keuangan Daerah	24
TABEL 2.4 Penelitian terdahulu.....	25
TABEL 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	29
TABEL 4.1 Rasio Kemandirian Pemerintahan.....	34
TABEL 5.1 Rasio Efektivitas Pemerintah.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Rasi Efektivitas PAD.....	3
Tabel 1.2 Sumber-sumber Rasio Kemandirian PAD.....	5
Tabel 2.1 Tingkat Kemampuan Efektivitas Keuangan Daerah	19
Tabel 2.2 Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah.....	21
Tabel 2.4 Penelitian terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan salah satu kota yang telah menerapkan otonomi daerah dengan landasan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 sebagai dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Peraturan Perundangan tersebut menuntut peran legislatif yang semakin besar dengan kedudukan yang terpisah dari eksekutif, kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, bukan lagi kepada presiden, serta adanya kepastian bahwa pelaksanaan pemerintahan dapat ikut diawasi oleh masyarakat melalui DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan alat dalam menentukan pendapatan dan pengeluaran, implementasi dan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, otorisasi pengeluaran, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memobilisasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Perencanaan APBD sebagai perwujudan kesururuhan aktivitas dan kegiatan pemerintah menuntut adanya partisipasi aktif yang menampung berbagai aspirasi masyarakat sehingga akan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah. Analisis kinerja keuangan diukur melalui perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan, beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan daerah, Rasio Kemandirian dan Rasio Efisiensi. Menurut Bisma (2010 hal 77).

Rasio Efektivitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Menurut Halim (2007, hal 233) Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya ekstren dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut

Tabel I.1

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		% persentase
	Anggaran	Realisasi	
2011	1.110.469.593.763	995.072.572.141	(89,61)
2012	1.594.454.835.916	1.147.901.461.607	(71,99)
2013	1.578.247.819.724	1.206.169.709.147	(76,42)
2014	1.678.116.623.125	1.384.246.114.729	(82,49)
2015	1.794.704.774.012	1.489.723.189.088	(83,01)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran

Dilihat dari data dalam tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD masih kurang efektif, hal ini terlihat selama 5 tahun hanya pada tahun 2011, 2014, 2015 yang mampu mencapai target persentase, sementara untuk tahun 2012 dan 2013 tidak mencapai target persentase. Perbandingan antara PAD dengan target penerimaan anggaran merupakan komponen mengukur kinerja keuangan daerah yang disebut rasio efektivitas. Tabel 1.1 memberikan gambaran jika dibandingkan realisasi dengan anggaran maka terlihat persentasenya belum mencapai angka 100%. Sedangkan, Menurut Halim (2007, hal 128) Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100 persen. Namun semakin

tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin baik.

Menurut Gusti Agung (2011, hal 17) “Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai suksesnya atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai petingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan”.

Keberhasilan menggali dan meningkatkan potensi PAD juga berkaitan dengan kemampuan suatu daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari PAD bukan melalui sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat, provinsi ataupun dari pinjaman.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kemandirian kota Medan dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.3

Sumber – Sumber Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah

Tahun	(a) Pendapatan Asli Daerah	(b) Pendapatan Transfer	(c) Lain-lain PAD yang sah	(d=a+b+c) Total Pendapatan Daerah	(e=a/d)
2011	995.072.572.141	1.718.727.194.630	33.559.267.650	2.747.359.034.421	36,22
2012	1.147.901.461.607	1.822.682.350.868	27.620.100.000	2.998.203.912.475	38,23
2013	1.206.169.709.147	2.060.845.776.012	9.328.800.000	3.276.344.285.159	36,81
2014	1.384.246.114.729	2.567.869.713.502	0,00	4.042.115.828.231	34,22
2015	1.489.723.189.088	2.769.321.301.627	0,00	4.259.044.490.715	34,98

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa besarnya pendapatan transfer masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat tingginya ketergantungan fiskal pemerintah kota Medan terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2011-2015. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan rasio kemandirian dengan cara membandingkan PAD dengan sumber dana eksternal (bantuan pusat/ provinsi dan pinjaman). (Halim, 2007, hal 128,) Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung bahwa arti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Pendapatan asli daerah bukan saja menjadi indikator penting kemandirian daerah. Akan tetapi dapat pula diukur dengan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dengan melihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Kriteria kemandirian masuk dalam kategori “baik” jika 50-75 persen (Litbang Depdagri, 1991). Melihat tabel 1.2 memberikan gambaran secara umum bahwa 5 (lima) tahun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah bahkan tidak mencapai target total penerimaan daerah. Mahmudi dalam Suprianto (2013) mengatakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam melaksanakan kemandirian.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Dori Saputra (2014). tentang kemandirian dan efektifitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan analisis rasio kemandirian dan rasio efektivitas sebagai alat analisisnya. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam periode 2004-2011 masuk dalam kategori kemandirian

keuangan yang rendah sekali dan secara tren kemandirian dari tahun 2005-2011 berada dalam kecendrungan menurun. Sedangkan untuk analisis rasio efektivitas masuk dalam kategori keuangan yang sangat efektif secara rata-rata dari tahun 2004-2011 dan tren efektivitas keuangan daerah menunjukkan cenderung naik.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah yang berjudul **“Analisis Efektivitas Keuangan Dan Kemandirian Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian rasio efektivitas dan kemandirian pada pemerintah kota medan belum tercapai.
2. Faktor apa saja yang dijelaskan dari kinerja keuangan pemerintah belum mencapai target yang ada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan diukur dengan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2011-2015.
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan diukur rasio kemandirian pada tahun 2011-2015.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2011-2015.
2. Untuk menegtahui bagaimana kinerja keuangan daerah Kota Medan berdasarkan rasio kemandirian pada tahun 2011-2015.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis
menambah pemahaman penulis tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi pemerintah daerah

sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi ketercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi peneliti berikutnya

memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembandingan terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Kinerja Keuangan Daerah

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam arti sempit, keuangan daerah yakni yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya segala bentuk dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim (2008, hal. 18). “Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

Menurut Abdul Halim (2008, Hal. 20) “Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah”. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN).

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP No 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau yang sering disebut bendaharaan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 mengatakan bahwa “APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisien dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas”.

Menurut Halim(2007,hal 330) “Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah”.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(1) Pengertian APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didanai dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sementara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah, didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).

Menurut Abdul Halim (2008, hal. 15). “APBD adalah Suatu rencana pekerjaan keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dimana badan legislatif memberikan kredit kepada badan-badan eksekutif untuk melakukan pembiayaan sehubungan dengan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondsleg*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi”.

Berdasarkan pasal 64 ayat (2) UU. No. 5 tahun 1947 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan penerimaan sumber-sumber pemerintah daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran defenisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era Orde Baru. Menurut Abdul Halim (2007, hal:16).

(2) Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai berikut :

(a) Pendapatan daerah

Penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dan konteks pendapatan daerah, dari format LRA diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dapat bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan dan transfer

lainnya dari pemerintah serta dari pendapatan lainnya yang sah. menurut Mardiasmo (2013,hal,189).

(b) Belanja Daerah

“Menurut Mardismo (2013,hal,190) Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

(c) Pembiayaan daerah

“Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya”. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran dicatat dalam pos pembiayaan neto. Menurut Mardismo(2013,hal,191).

d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi kinerja keuangan pemerintah daerah adlah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undang selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Mardiasmo (2009,hal,269). “Kinerja adalah merupakan konsep yang didalamnya tercakup memiliki arti yang beragam, untuk audien yang berbeda, dan konteks yang berbeda, akibatnya desain indikator kinerja bagi organisasi swasta dan sektor publik menjadi sulit”.

“Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manejer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial”. Menurut Mardiasmo (2009,hal,269) Dalam penelitian ini, istilah yang penulis maksudkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasilkerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undang selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain melalui pendapatan rasio keuangan. Rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur lainnya. Suatu rasio tersebut diperbandingkan dengan perusahaan lainnya yang sejenis, sehingga adanya perbandingan ini maka perusahaan tersebut dapat mengevaluasi situasinperusahaan dan kinerjanya.

e. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara

berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Menurut Abdul Halim (2007, hal 126) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dan merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

f. Parameter Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektifitas, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Analisis kinerja keuangan yang telah dikembangkan dan dibangun oleh Musgrove, Richard A, dan B Musgrove, Peggy dalam bukunya "*Publik Finance In Theori and Practice* (dalam Rekso Hadipradjo, Ekonomi publik)". Namun dalam penerapannya disesuaikan dengan kemampuan APBD. Menurut Abdul Halim (2012, hal. 128) menyatakan beberapa rasio keuangan yang juga dipakai untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain:

- 1) Rasio Kemandirian (otonomi fiskal)

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerinta Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

- 2) Rasio Efektifitas dan Efesiensi

$$\frac{\text{Relealisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

- 3) Rasio Keserasian

$$\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4) Debt service coverage ratio (DSCR)

$$\frac{(\text{PAD} + \text{BD} + \text{DAU}) - \text{BW}}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

- 5) Rasio Pertumbuhan, Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dalam meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode-periode berikutnya.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam Suprianto (2007) rasio-rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1) Rasio Kemandirian

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2) Rasio Ketergantungan Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3) Rasio Derajat Desentralisasi

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD ”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

<p>Realisasi Penerimaan PAD</p> $EK = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD berdasarkan potensi rill daerah}} \times 100$ <p>Target penerimaan PAD berdasarkan potensi rill daerah</p>

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100 persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen dalam negeri dengan kepmendagri No.690.900-327, tahun 1996 mengategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom kedalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

Tingkat Kemampuan Efektivitas Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan daerah	Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	0% - 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327, 1996

Tren efektivitas keuangan daerah

Efektivitas keuangan daerah penting dinilai untuk mengetahui arah perkembangan dimensi efektivitas keuangan daerah. Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tahun tertentu barangkali belum dapat memenuhi efektivitas keuangannya, tetapi dengan melihat tren positif dari kedua dimensi keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju efektivitas keuangan daerah yang ideal.

Analisis tren afektivitas keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan efektivitas keuangan daerah tersebut. Apabila persentase tren EKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan EKD. Semakin besar persentase tren EKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan efektivitas keuangan daerah kabupaten/ kota semakin baik. Sebaliknya, bila persentase

kurang dari 100% maka terjadi penurunan efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota.

Dari penjelasan ini maka tren kemandirian keuangan daerah dapat dipormulasikan sebagai berikut

$$\text{Tren EKD} = \frac{\text{EKD Tahun pembandingan}}{\text{EKD Tahun dasar}} \times 100\%$$

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut formula untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah :

$$\text{KKD} = \frac{\text{pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100$$

Rasio kemandirian menggambarkan keuntungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 2.2 berikut:

Tabel II.2

Tingkat Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah	Kemandirian %
Rendah sekali	0,00 - 25 %
Rendah	25 - 50 %
Sedang	50 - 75 %
Tinggi	75 - 100 %

Sumber : tim litbang depdagri – fisipol ugm, 1991

Tren Kemandirian keuangan daerah

Suatu daerah otonom kabupaten/kota pada suatu tertentu barangkali belum dapat memenuhi kemandirian keuangannya, tetapi dengan melihat tren positif dari dimensi kemandirian keuangan tersebut diperoleh keyakinan, walaupun lambat ada peluang akan menuju kemandirian keuangan daerah yang ideal.

Analisis tren kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui arah perkembangan kemandirian keuangan daerah tersebut. Apabila persentase tren KKD lebih dari 100%, maka telah terjadi perkembangan KKD. Semakin besar persentase tren KKD dari tahun ke tahun maka arah perkembangan kemandirian Kabupaten/Kota semakin baik. Sebaliknya, bila persentase kurang dari 100% maka terjadi penurunan kemandirian keuangan Kabupaten/Kota.

Dari penjelasan ini maka tren kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Tren KKD} = \frac{\text{KKD Tahun pembandingan}}{\text{KKD Tahun dasar}} \times 100\%$$

Tabel II.4
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Dori saputra, skripsi (2014)	Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota dipropinsi Sumatera barat	Secara rata-rata rasio kemandirian rendah sekali karena berada pada 0%-25% dan tren kemandirian keuangan daerah menandakan cenderung menurun berada pada 95,3% kurang dari 100%. Kemudian untuk rasio efektifitas sangat efektif karena berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dan tren efektivitas cenderung naik berada diatas 100%.
2	Ayu febriyanti puspita sari, skripsi (2012)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Malang	Rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah kota Malang dalam lima tahun berakhir masih menunjukkan pola hubungan instruk dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah.
3	Anggi melintha cahya, skripsi (2010)	Analisis rasio efektifitas keuangan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah daerah	Rasio efektivitas keuangan pada kabupaten Tasikmalaya sudah efektif pada periode tahun 2005-2008 rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daeah, serta memiliki hubungan (korelasi) yang kuat dan searah. Artinya jika rasio efektivitas keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya sedah efektif maka kinerja pemerintah daerah pun semakin baik.

4	Amin Rahmawati jurnal vol 1 (2013)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sukoharjo 2012-2013	Secara rata-rata rasio kemandirian sukoharjo mengalami peningkatan yaitu, 11,37% pada tahun 2011 17,21% pada tahun 2012 dan 17,36% pada tahun 2013 tetapi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.
5	Heri Triyono jurnal vol 3 (2011)	Analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah kabupaten sukoharjo APBD 2009-2011	Berdasarkan rasio kemandirian dapat diketahui tingkat rasio kemandirian pada tahun 2009 sebesar 7,11% dan mengalami peningkatan sebesar 1,65% pada tahun 2010 dengan kemandirian 8,76% pada tahun 2010 mengalami 1,7% dari tahun sebelumnya dengan tingkatan kemandirian sebesar 10,46% dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian kabupaten sukoharjo tahun 2009-2011 berada pada tingkat kemandirian dengan internal 0%-25%.

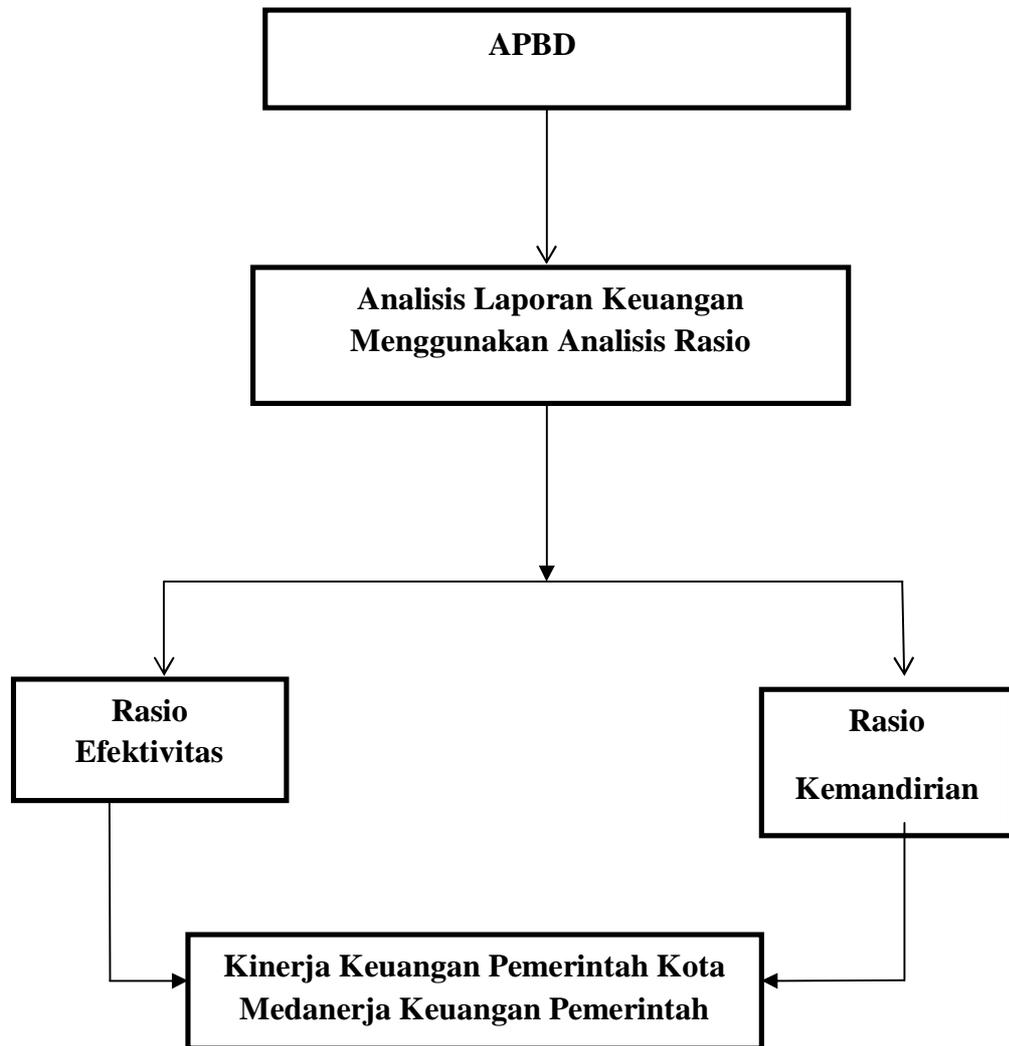
B. Kerangka Berfikir

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pengukuran rasio efektivitas penting dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah merealisasikan PAD yang termasuk komponen penting pada daerah otonom, dikatakan efektif jika mencapai 100%. Namun, semakin tinggi rasi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Rasio kemandirian dilakukan karena dapat menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat atau propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Apabila digambarkan dengan skema, maka penelitian membuat kerangka berfikir sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Skema Kerangka Berfikir**Gambar II.1**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menyusun, mengkalifikasikan, menafsirkan, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

B. Defenisi Operasional Variabel

Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dan dinyatakan dalam persentase, setelah membandingkan dalam hasil yang telah dicapai dengan besarnya modal yang digunakan, semakin besar persentase atas perbandingan tersebut, maka semakin tinggi prestasi. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas keuangan daerah

memberikan gambaran tentang kontribusi pendapatan negara (pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak) selain hibah jumlah total prndapatan pemerintah pusat. Mahmudi (2010, hal,249) Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

Realisasi penerimaan PAD

$$EK = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100$$

Target penerimaan PAD berdasarkan potensi riil daerah

2. Rasio kemandirian keuangan daerah

merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Total Pendapatan asli daerah

$$KKD = \frac{\text{Total Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pusat + provinsi + pinjaman}} \times 100$$

Bantuan pusat + provinsi + pinjaman

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dilakukan oleh peneliti adalah pada Kantor Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2. Waktu penelitian dilakukan pada 21 Desember 2016 s/d Maret 2017. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tabel perincian jadwal kegiatan penelitian.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni 2017				Juli 2017				Agustus 2017				September 2017				Oktober 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■	■																	
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal						■	■	■	■											
4	Seminar Proposal										■										
5	Riset											■	■								
6	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■			
8	Sidang Meja Hijau																		■		

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data

1. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitian, (data yang diperoleh dari perusahaan/ Instansi berupa laporan keuangan, struktur organisasi, sejarah singkat, dan lain –lain).

Jenis data

1. Data Kuantitatif

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran yaitu dengan mempelajari, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Tehnik Dokumentasi

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang ada dalam dokumen instansi yaitu Kantor Pemerintah Kota Medan yang diperoleh penelitian secara langsung.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dekriptif. Analisis statistik dekriptif merupakan teknik analisis data untuk meringkas dan mendeskripsikan data numerik agar mudah untuk diinterpretasikan.

Langkah-langkah yang dibuat penulis dalam teknik analisis data ini sebagai berikut :

1. Mengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian, objek penelitian yaitu pada kantor pemerintah kota medan
2. Menghitung data dengan menggunakan rasio efektivitas keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan tren masing-masing rasio.
3. Menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil perhitungan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kinerja keuangan pemerintahan kota Medan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Medan dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kota Medan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2011-2015. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Medan pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan yang dapat dari Pendapatn Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kota Medan. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. Adapun hasildari Analisis Rasio tersebut adalah:

a) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah Daerah Kota Medan.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Target pendapatan daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{Rp. 2.747.359.034.421}}{\text{Rp. 3.083.140.290.623}} \times 100\%$$

$$= 89,1\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 2.998.203.912.475}}{\text{Rp. 4.034.121.333.860}} \times 100\%$$

$$= 74,3\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 3.276.344.285.159}}{\text{Rp. 4.106.900.462.377}} \times 100\%$$

$$= 79,8\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 4.042.115.828.231}}{\text{Rp. 4.560.412.529.543}} \times 100\%$$

$$= 88,6\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. 4.259.044.490.715}}{\text{Rp. 5.046.111.839.162}} \times 100\% \\ &= 82,8\% \end{aligned}$$

Tabel 4.2

Efektivitas Pendapatan Pemerintah**Kota Medan**

Tahun	Realisasi	Anggaran	Rasio Efektivitas
2011	Rp. 2.747.359.034.421	Rp. 3.083.140.290.623	89,1%
2012	Rp. 2.998.203.912.475	Rp. 4.034.121.333.860	74,3%
2013	Rp. 3.276.344.285.159	Rp. 4.106.900.462.377	79,8%
2014	Rp. 4.042.115.828.231	Rp. 4.560.412.529.543	88,6%
2015	Rp. 4.182.763.354.874	Rp. 5.046.111.839.162	82,8%

Sumber : Data diolah (2016)

Dapat dilihat dari tabel 4.2 rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2011, 2014 dan 2015 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2012 dan tahun 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 89,1%, dan tahun 2014 sebesar 88,6% dan tahun 2015 sebesar 82,8% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 74,3% dan 79,8%, tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang

tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada Pemerintah Kota Medan.

b) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{\text{Rp. 995.072.572.141}}{\text{Rp. 2.747.359.034.421}} \times 100\%$$

$$= 36,2\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp. 1.147.901.461.607}}{\text{Rp. 2.998.203.912.475}} \times 100\%$$

$$= 38,3\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 1.206.169.709.147}}{\text{Rp. 3.276.344.285.159}} \times 100\%$$

$$= 36,8\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 1.384.246.114.729}}{\text{Rp. 4.042.115.828.231}} \times 100\%$$

$$= 34,2\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. 1.489.723.189.088}}{\text{Rp. 4.258.044.490.715}} \times 100\%$$

$$= 33,8\%$$

Tabel 4.1

Rasio Kemandirian Pemerintah

Kota Medan

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian
2011	Rp. 995.072.572.141	Rp. 2.747.359.034.421	36,2%
2012	Rp. 1.147.901.461.607	Rp. 2.988.203.912.475	38,3%
2013	Rp. 1.206.169.709.147	Rp. 3.276.344.285.159	36,8%
2014	Rp. 1.384.246.114.729	Rp.4.042.115.828.231	34,2%
2015	Rp. 1.489.723.189.088	Rp. 4.259.044.490.715	33,8%

Sumber : Data diolah (2016)

Dilihat dari tabel 4.1, maka untuk Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2011 rasio kemandirian sebesar 3,62%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada di antara 25% dan 50%, untuk tahun 2012 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 38,3% , yang juga termasuk dalam kategori rendah yang termasuk dalam hubungan konsultatif karena diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2013 sampai tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 36,8%, 34,2%, 33,8%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada dalam 25% dan 50%.

Penurunan yang terjadi pada tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kota Medan, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kota Medan, yang artinya Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Kota Medan masih bergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah pemerintah Kota Medan dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren masih sangat tinggi. Daerah blum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan pemerintah daerah.

B. Pembahasan

1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio Efektivitas keuangan dan rasio Kemandirian daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan tidak tercapainya target atas penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Halim (2012 : 212). kinerja keuangan daerah atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, bentuk dari penilaian rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Pemerintah Daerah Kota Medan, selain itu juga besarnya dana sumbangan yang diberikan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Medan, dan juga besarnya jumlah belanja daerah, bahkan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut.

Hal ini tidak baik bagi kinerja pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja-belanja daerah, sehingga pemerintah daerah Kota Medan mengalami defisit atau kerugian.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Ayu febriyanti puspita sari (2012) tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan lima tahun berakhir masih menunjukkan pola hubungan instruk dimana peranan pemerintah pusat lebih mendominasi dari pada rata-rata pencapaian rasio keuangan masih tergolong rendah.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rasio keuangan daerah yang mengalami penurunan maupun yang mengalami peningkatan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hanya ditahun 2012 rasio kemandirian Pemerintah Kota Medan mengalami penurunan. Untuk rasio kemandirian Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam diantara 25% dan 50%.

Menurut Halim (2012 : 221) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tinggi ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Medan sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk

mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Dori Saputra (2014). Tentang kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan rasio kemandirian dan rasio efektivitas sebagai alat analisisnya. Daerah otonom Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam periode 2004-2011 masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang rendah sekali secara tren kemandirian dari tahun 2004-2011 berada dalam kecenderungan menurun.

Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Medan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Medan secara keseluruhan dapat dikatakan masih rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

- b. Untuk tingkat efektivitas Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan. Walaupun rasio efektivitas mengalami peningkatan, tetapi rasio efektivitas untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.

Penurunan rasio efektivitas terjadi disebabkan karena pendapat daerah masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan Pemerintah Kota Medan dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Menurut Mardiasmo (2013:112) Rasio Efektivitas kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Penelitian sejenis sebelumnya telah dilakukan oleh Anggi malintha cahya (2010) pada kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan rasio efektivitas keuangan pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Rasio efektivitas keuangan pada kabupaten Tasikmalaya sudah efektif pada periode tahun 2005-2008 rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rasio efektivitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, serta memiliki hubungan (korelasi) yang kuat dan searah. Artinya jika rasio efektivitas keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan, dan meningkatnya belanja daerah, bahkan melebihi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan, selain itu juga pemerintah daerah Kota Medan tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kota Medan masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat.
2. rasio efektivitas atas pendapatan daerah untuk tahun 2011, 2014 dan 2015 mengalami peningkatan, tetapi untuk tahun 2012 dan tahun 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan. Untuk tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 89,1%, dan tahun 2014 sebesar 88,6% dan tahun 2015 sebesar 82,8% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%. Sedangkan untuk tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 74,3% dan 79,8%, tetapi masih termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada dibawah 100%.

3. Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Medan yang diukur dalam 5 tahun, dimana untuk tahun 2011 rasio kemandirian sebesar 3,62%, yang termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada di antara 25% dan 50%, untuk tahun 2012 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 38,3% , yang juga termasuk dalam kategori rendah yang termasuk dalam hubungan konsultatif karena diantara 25% dan 50%, untuk tahun 2013 sampai tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 36,8%, 34,2%, 33,8%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah dan termasuk dalam pola hubungan konsultatif karena berada dalam 25% dan 50%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Medan lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
2. Pemerintah Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan penambahan waktu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2008), *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Amin Rahmawati (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 2012-2013*. Jurnal Sukoharjo.
- Anggi Maliantha Cahya (2010). *Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Ayu Febrianti Puspitasari (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2012*. Skripsi Malang.
- Dori Saputra (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Negeri Padang.
- Evi Ica Krisnawati (2007). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Batu*. Skripsi.
- Gusti Agung (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim (2007). *Akuntansi Sektor publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat.
- Heri Triyono (2011) *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo APBD.2009-2011*. Jurnal Sukoharjo.
- Mardismo (2013) *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat.
- Muindro Renyowijoyo (2008). *Akuntansi Sektor Publik . Oorganisasi Non Laba Edisi Pertama*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Supriant 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Skripsi Jurusan Akuntansi, Fe, Universitas Negeri Gorontalo.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.